

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha keluar dari negaranya dan kemudian mencari perlindungan ke wilayah lain di luar batas negara asal yang diyakini aman demi kelangsungan hidupnya.<sup>1</sup> Pada saat ini banyak negara yang berkonflik baik itu konflik internal atau pun eksternal yang mengakibatkan terjadinya gelombang arus pengungsi yang besar ke beberapa negara lainnya. Hal ini menjadi pro dan kontra bagi negara yang didatangi pengungsi meskipun perlindungan dan penerimaan pengungsi sudah menjadi tanggungjawab internasional.

Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tercatat lebih dari 89,3 juta pengungsi dan pencari suaka menurut data UNHCR pada akhir tahun 2021.<sup>2</sup> Perlindungan dan pemberian bantuan atas pengungsi sudah diatur dalam The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967.<sup>3</sup> Menerapkan prinsip utama *non-refoulement* yang saat ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>4</sup> Prinsip ini mengutamakan kepedulian atas pengungsi dengan melarang penolakan dan pengembalian ke negara asal yang terindikasi belum aman untuk ditempati.

---

<sup>1</sup> Hamza Fadil and Shen Yi, "Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim - International Protection Regime - European Union (EU) in Germany," *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4 (2019) : 164. *Journal of Public Administration and Governance* ISSN 2161-7104 2019, Vol. 9, No. 4.

<sup>2</sup> UNHCR, "Figure a Glance" 2022, diakses pada 15 Desember 2022 <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

<sup>3</sup> Laura Barnett, 'Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime', *International Journal of Refugee Law*, 14.2-3 (2002) : 245 [https://doi.org/10.1093/ijrl/14.2\\_and\\_3.238](https://doi.org/10.1093/ijrl/14.2_and_3.238).

<sup>4</sup> UNHCR, "The 1951 Refugee Convention" <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

Salah satu negara yang telah meratifikasi The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 adalah Korea Selatan pada tahun 1992.<sup>5</sup> Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang mengimplementasikan The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 ke dalam UU domestiknya.<sup>6</sup> Hal ini terdapat dalam UU pengungsi “Refugee Act” yang mulai berlaku mulai 1 Juli 2013. UU ini mengatur dan mengontrol para pelamar pengungsi dengan mengajukan permohonan berdasarkan *Refugee Status Determination* (RSD). Proses RSD dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum diakui sebagai pengungsi dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Namun, dengan ratifikasi The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 dan implementasi kedalam peraturan domestiknya, tingkat penerimaan pemerintah Korea Selatan atas permohonan pengungsi sangatlah rendah. Korea Selatan hanya menerima 1,5 persen dari total permintaan penerimaan pengungsi dalam rentang tahun 2010 hingga 2020.<sup>7</sup> Korea Selatan baru menerima pengakuan pengungsi pertama pasca implementasi pada tahun 2001 setelah menjadi anggota dewan UNHCR setahun sebelumnya.

Total aplikasi permohonan pengungsi yang masuk dari tahun 2017 hingga 2021 ialah 50.542 orang, namun yang diterima sebagai pengungsi hanya 485 orang.<sup>8</sup> Dengan kebijakan dalam sistem penyaringan, proses yang panjang, dan pengetatan dalam proses wawancara membuat proses pelamaran pengungsi

---

<sup>5</sup> Kim Hyun Mee, “‘Life on Probation’: Ambiguity in the Lives of Burmese Refugees in South Korea”, *Asian and Pacific Migration Journal*, 21.2 (2012) : 218 <https://doi.org/10.1177/011719681202100205>.

<sup>6</sup> Myeong-sook Yoon, Israel Fisseha, and So-won Suk, “A Refugee Protection within a Less-Restrictive Immigration Policy and Refugee Protection in South Korea: A Policy Review of 2013’s Refugee Act,” *Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange* 6, no. 2 (2020): 1–16. 3

<sup>7</sup> Migrants Refugee, <https://migrants-refugees.va/country-profile/south-korea/>.

<sup>8</sup> Ministry of Justice Republik of Korea, 2022, diakses pada 22 Desember 2022. <https://www.moj.go.kr/moj/2417/subview.do>.

berlangsung sulit. Selain itu, sentimen publik di Korea Selatan memberikan pandangan negatif dan menganggap pengungsi sebagai ancaman akan homogenitasnya.<sup>9</sup>

Kebijakan Korea Selatan terhadap pengungsi global menjadi sesuatu yang asing bagi negara-negara maju. Hal ini disebabkan perbedaan yang mendasar dari kebijakan yang lebih terbuka atas pengungsi yang berasal dari Korea Utara dibandingkan pengungsi global.<sup>10</sup> Menurut Komisaris Tinggi UNHCR dan juga di dalam OECD (The Organization of Economic Cooperation and Development), Korea Selatan menjadi negara dengan penerimaan pengungsi terendah di dunia.<sup>11</sup>

Kebijakan *Trust Politic* yang dibawa oleh Presiden Park Geun Hee mengarahkan pemerintahan yang sepenuhnya siap untuk menciptakan perdamaian dengan peningkatan kepercayaan di Semenanjung Korea terutama dengan Korea Utara.<sup>12</sup> Hasil dari kebijakan ini membuat banyak pengungsi asing yang ditolak karena berbagai bantuan diprioritaskan kepada pengungsi Korea Utara. Seperti pada tahun 2016 sekitar 28 orang pencari suaka dari Suriah ditahan di Bandara Incheon dan dilarang untuk memasuki wilayah Korea Selatan.<sup>13</sup> Permohonan yang mereka ajukan ditolak pemerintah. Hanya 3 orang

---

<sup>9</sup>Euy Ryung Jun, “Voices of Ordinary Citizens’: Ban Damunhwa and Its Neoliberal Affect of Anti-Immigration in South Korea,” *Critical Asian Studies* 51, no. 3 (2019): 386–402.

<sup>10</sup> Human Rights Commission in United States, “South Korea's Refugee Policy in the Yoon Administration” 24 Juni 2022, diakses pada 26 Februari 2023. <https://humanrightscommission.house.gov>

<sup>11</sup> Lee Shin Hwa, “South Korea’s Refugee Policies: National and Human Security Perspectives.” *Human Security and Cross-Border Cooperation in East Asia*, (2019): 232 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6\\_11s](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6_11s)”

<sup>12</sup> Seongwhun Cheon, “Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration” *Center for Strategic and Intenational Studies Office of Korea Chair*, May 2013.

<sup>13</sup>Amelia Smith, “Persecuted at home, denied asylum in South Korea: the Egyptians with nowhere to go” Memo, 10 September 2018, diakses pada 15 november 2022. <https://www.middleeastmonitor.com/20180910>.

pengungsi Suriah yang diterima, sedangkan 660an orang lainnya di berikan izin atas dasar status kemanusiaan tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah.<sup>14</sup>

Selain itu penolakan juga terjadi pada bulan Januari hingga Mei 2018 terdapat 112 aplikasi permohonan pengungsi dari Mesir yang tidak diterima oleh pemerintah.<sup>15</sup> Penolakan atas permohonan pengungsi yang berasal dari Yaman di Jeju, Korea Selatan pada tahun 2018 memicu sentiment negatif masyarakat saat itu. Dari 480 permohonan pengungsi yang berasal dari Yaman hanya dua orang yang diterima dan diberikan status sebagai pengungsi melalui proses yang panjang.<sup>16</sup> Menanggapi hal ini banyak bermunculan demonstrasi anti migran yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan di seluruh kota yang berlangsung hampir tiga bulan lamanya. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menolak dan mengeluarkan Yaman dari daftar negara bebas visa untuk masuk ke Pulau Jeju.

Namun perubahan kebijakan Korea Selatan dalam penerimaan pengungsi terjadi pada tahun 2021. Dalam pertemuan mingguan nya, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In menyebutkan, “Korea Selatan harus menciptakan kesempatan untuk berkembang menjadi negara yang bermartabat dan mendukung HAM.”<sup>17</sup> Presiden Moon Jae-In juga menyebutkan akan mengutuk keras kejahatan yang tidak manusiawi termasuk menjanjikan langkah-langkah

---

<sup>14</sup> Denny Armandhanu, “Pengungsi Suriah Berbulan-bulan Terdampar di Bandara Seoul” CNN Indonesia, diakses pada 19 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/>

<sup>15</sup> Hend Elbehary, “South Korea abolishes free-visa entry for Egyptians starting October” Egypt Independent, 13 Juli 2018, diakses pada 15 November 2022. <https://egyptindependent.com>.

<sup>16</sup> New York Times, “Just 2 of More Than 480 Yemenis Receive Refugee Status in South Korea” 14 Desember 2018, diakses pada 7 November 2022. <https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/asia/yemen-south-korea-refugees.html>.

<sup>17</sup> Yonhap News Agency, “(2nd LD) Moon says S. Korea has shown its dignity by embracing Afghan evacuees” 30 Agustus 2021, diakses pada 1 Desember 2022. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210830005952315>.

dukungan yang lebih komprehensif atas pengungsi termasuk pendidikan bagi anak-anak. Hal ini memperlihatkan indikasi adanya perubahan kebijakan pengungsi Korea Selatan yang selama ini tertutup menjadi lebih terbuka atau *open door policy*.

Bentuk *open door policy* Korea Selatan atas pengungsi dapat dilihat melalui *Operation Miracle*. Operasi ini dibentuk untuk memproses penyelamatan dan penerimaan pengungsi yang berasal dari Afghanistan pada 24 sampai 27 Agustus 2021. *Operation Miracle* berisikan upaya evakuasi para pengungsi Afghanistan melalui operasi militer dengan mengerahkan satu tanker multiguna (KC-330) dan dua pesawat angkut militer (C-130J) ke Kabul Senin pagi pada 23 Agustus 2021.<sup>18</sup>

Penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan mengakibatkan kekacauan yang dilakukan oleh Taliban dan memicu gelombang arus pengungsi pada Agustus 2021 lalu.<sup>19</sup> Meski telah ditandatangani perjanjian damai antara AS dengan Taliban pada 29 Februari 2020, namun belum sampai batas penarikan pasukan AS, Taliban telah mulai memasuki kota dan mengambil alih dengan menyerang pangkalan militer. Masyarakat Afghanistan berusaha keluar dari negaranya dikarenakan Taliban mulai melancarkan serangan lebih luas yang ditujukan langsung terhadap masyarakat sipil.<sup>20</sup> Para pengungsi berusaha mencari perlindungan ke beberapa negara tetangga seperti Pakistan, Iran, Jerman

---

<sup>18</sup>Ministry of National Defense Republik of Korea, 15 September 2021, diakses pada 7 November 2022. <https://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command>.

<sup>19</sup> Kim Mangi, "The Successful Completion of ' Operation Miracle ' and Its Significance," no. 239 (2021): 1–5.

<sup>20</sup>BBC News Indonesia, "Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok Yang Kini Menguasai Afghanistan" diakses pada 13 Januari 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920>

dan beberapa operasi penyelamatan yang salah satunya dilakukan oleh Korea Selatan.

Operasi ini yang pertama dilakukan oleh Korea Selatan dalam penyelamatan dan penerimaan pengungsi asing dalam jumlah besar.<sup>21</sup> Penerimaan atas hampir 390 orang pengungsi yang berasal dari Afghanistan ini merupakan angka yang besar dan hal yang paling terlihat mengingat rendahnya penerimaan pengungsi di Korea Selatan. Para pengungsi Afghanistan ini diberikan fasilitas yang terbaik mulai dari pembentukan pemukiman yang aman, dokter, perawat, hingga satu unit penjagaan guna memantau fasilitas.<sup>22</sup> Hingga program pembelajaran Bahasa Korea, budaya, hingga dukungan keuangan untuk membantu mereka beradaptasi.<sup>23</sup> Mereka juga diberikan visa jangka panjang yang memungkinkan untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi dibandingkan kebijakan sebelumnya terhadap beberapa negara seperti Suriah, Yaman, dan Mesir. Penerimaan pengungsi Afghanistan dengan berbagai fasilitas yang diberikan membuat hal ini menarik dalam sejarah penerimaan pengungsi Korea Selatan yang rendah dan sulit. Masalah ini penting dan menarik untuk diteliti dalam melihat perubahan kebijakan Korea Selatan dalam penanganan pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021.

---

<sup>21</sup> Kim Mangi, "The Successful Completion of ' Operation Miracle ' and Its Significance."

<sup>22</sup> Ser Myo Ja, "Operation Miracle Complete with 390 Afghan Arrivals", diakses pada 19 November 2022. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/08/27/national/socialAffairs/Afghan-Operation-Miracle-Kabul/20210827172000631.html>

<sup>23</sup> Ser Myo Ja.

<sup>24</sup> Seoho Lee dan Natalia Slavney, "Afghanistan Crisis Reignites South Korea's Refugee Debate" The Diplomat, 2 Oktober 2021, diakses pada 7 November 2022. <https://thediplomat.com/2021/10/afghanistan-crisis-reignites-south-koreas-refugee-debate/>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Semenjak diratifikasinya The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 pada tahun 1992 dan diimplementasikan dalam Refugee Act tahun 2013, Korea Selatan tampak konsisten menetapkan kebijakan yang tertutup terhadap pengungsi. Korea Selatan hanya menerima kurang dari 1.5% aplikasi suaka yang masuk ke Korea Selatan. Namun pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In tepatnya pada tahun 2021, pemerintahan Korea Selatan melakukan perubahan kebijakan yang lebih terbuka (*open door policy*) kepada pengungsi. Salah satu bentuk *open door policy* Korea Selatan dapat dilihat melalui *Operation Miracle* dalam proses penjemputan dan evakuasi pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. *Operation Miracle* merupakan representasi *open door policy* Korea Selatan karena tidak hanya menerima orang yang mencari suaka di perbatasan Korea Selatan saja melainkan melakukan operasi militer untuk menjemput dan mengevakuasi pengungsi yang berasal dari Afghanistan dalam rentang waktu lima hari pada akhir Agustus 2021. Hal ini penting dan menarik untuk diteliti dalam melihat perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut “Apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari masalah penelitian di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat untuk kedepannya yang dibagi menjadi dua jenis manfaat ;

##### **1. Manfaat Akademis**

Dengan hasil analisis dari studi kasus yang diangkat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan perbandingan penelitian selanjutnya terutama mahasiswa jurusan hubungan internasional terkait permasalahan pengungsi dan apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021 demi penelitian yang lebih dalam lagi ke depannya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini semoga menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menambah referensi bacaan dan juga diharapkan menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan seperti pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri dalam memahami apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021 jika nanti menghadapi masalah yang serupa.

## 1.6 Studi Pustaka

Referensi pertama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini ialah tulisan yang ditulis oleh Lee Shin Wha yang berjudul “*South Korea’s Refugee Policies : National and Human Security Perspectives.*”<sup>25</sup> Permasalahan terkait pengungsi di Korea Selatan merupakan kebijakan dengan prioritas yang rendah. Pengungsi terbagi menjadi dua jenis, pengungsi global yang berasal dari berbagai wilayah, dan pembelot Korea Utara yang dianggap sebagai bagian dari Korea Selatan. Pengungsi menjadi hal yang diperbincangkan secara kritis di Korea Selatan terkait bagaimana cara untuk menanganinya. Berdasarkan pendekatan kemanusiaan, pengungsi haruslah diberikan perlindungan, sedangkan jika dilihat melalui pendekatan keamanan nasional pengungsi menjadi hal yang mampu menimbulkan masalah bagi keamanan domestik. Sulit untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini dalam menangani pengungsi.

Korea Selatan telah dikritik oleh dunia internasional terkait tertutupnya pintu bagi para pengungsi meski sudah membentuk Undang-Undang (UU) pengungsi. Antara tahun 1994-1999 semua permintaan suaka ditolak oleh pemerintah, akumulasi pengungsi dari tahun 1994 hingga 2016 hanya 678 yang diterima, jumlah ini kurang dari 3% permohonan yang masuk. Korea Selatan menjadi negara dengan penerima suaka terendah bersamaan dengan Jepang.

Pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun tantangan akan pengungsi di masukkan ke dalam kebijakan keamanan nasional, sedangkan pada masa pemerintahan Lee Myung-Bak isu pengungsi dikaitkan dengan isu hak asasi

---

<sup>25</sup> Lee Shin Hwa, “*South Korea’s Refugee Policies: National and Human Security Perspectives.*” *Human Security and Cross-Border Cooperation in East Asia*, (2019): 227-248 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6\\_11s](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6_11s)”.

manusia dan kegiatan multilateral mengenai kemanusiaan, dan begitu juga pada masa pemerintahan Park Geun-Hye. Sedangkan dalam menghadapi pengungsi Korea Utara, pemerintah menerima mereka namun belum siap jika pengungsi datang secara massal mengingat akan menimbulkan krisis kemanusiaan dan masalah keamanan global.

Artikel Jurnal ini memberikan kontribusi awal bagi peneliti dalam melihat penanggulangan masalah pengungsi di Korea Selatan. Mulai dari adanya perbedaan perspektif dalam menghadapi pengungsi, hingga bentuk kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan dan menjadi yang terendah setelah Jepang dalam penerimaan pengungsi. Terdapat perbedaan antara artikel jurnal ini dengan penelitian dalam tujuan penulisan, yaitu artikel jurnal ini melihat pengungsi melalui perspektif keamanan nasional dan manusia sedangkan penelitian ini melihat perubahan kebijakan pengungsi Korea Selatan.

Referensi selanjutnya ialah artikel jurnal yang berjudul “*Voices of Ordinary Citizens: Ban Damunhwa and its Neoliberal Affect of Anti-Immigration in South Korea*” ditulis oleh EuyRyung Jun.<sup>26</sup> Dalam artikel jurnalnya ini dijelaskan bahwasanya sentimen masyarakat yang anti akan imigrasi termasuk pengungsi sudah menjadi hal yang biasa terdengar di negara yang terkenal akan homogenitasnya, Korea Selatan. *Ban Damunhwa* merupakan sentimen anti multikultur yang muncul ke permukaan saat arus pengungsi dan imigran mulai masuk ke Korea Selatan. Dalam forum diskusi online, mereka mengasumsikan pengungsi dan imigran sebagai berita palsu, ketakutan akan islamophobia, dan

---

<sup>26</sup> EuyRyung Jun, ““Voices of Ordinary Citizens’: Ban Damunhwa and Its Neoliberal Affect of Anti-Immigration in South Korea,” *Critical Asian Studies*. Vol. 5 No.3. (2019): 386-402 <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1619466>.

termasuk teori konspirasi mengenai pemerintah dan para kelompok sipil dan kelompok advokasi yang membantu para pengungsi.

Terdapat hubungan yang erat antara *Ban Damunhwa* dengan neoliberal yang dikaitkan dengan produktivitas, kemandirian, keadilan yang memperlihatkan para pengungsi dan imigran sebagai orang yang menghalangi perekonomian dan bergantung hidup kepada negara yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Presiden Moon Jae-In yang saat itu baru dilantik pada Mei 2017 menyebutkan akan menanggulangi masalah sosial yang merebak terkait isu pengungsi dan imigran. Terutama akan memberikan kesempatan yang sama, prosedur yang adil dan akan mereformasi kelesuan sosial yang selama ini terganggu.

Artikel jurnal ini berkontribusi atas penelitian ini dalam memahami bagaimana kondisi internal Korea Selatan untuk menerima kehadiran pengungsi. Terdapat tekanan yang kuat dari masyarakat karena adanya pengaruh neoliberal termasuk juga ketakutan akan perbedaan budaya yang kuat. Perbedaan utama antara artikel jurnal ini dengan penelitian ini ialah pada bagian topik yang dibahas, artikel jurnal membahas pengaruh dari *Ban Damunhwa* sedangkan penelitian ini melihat apa faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan dalam kebijakan pengungsi di Korea Selatan.

Selanjutnya ada referensi dari artikel jurnal yang berjudul “*Threatened or Threatening?: Securitization of the Yemeni Asylum Seekers in South Korea*” yang ditulis oleh Eunyoung Christina Choi dan Seo Yeon Park.<sup>27</sup> Protes anti-

---

<sup>27</sup> Eunyoung Christina Choi and Seo Yeon Park, “Threatened or Threatening?: Securitization of the Yemeni Asylum Seekers in South Korea,” *Asian Journal of Peacebuilding* Vol. 8 No. 1 (2020): 5-28, 10.18588/202005.00a118.

pengungsi yang terjadi di pusat kota Seoul berlangsung lebih dari tiga bulan dalam penolakan kehadiran para pencari suaka dari Yaman di Pulau Jeju. Pencari suaka telah disebutkan sebagai tantangan saat ini dalam perlindungan identitas, mengancam keamanan, hingga kesejahteraan. Keamanan perbatasan semakin diperkuat semenjak kejadian 9/11 termasuk pengaturan terkait pencari suaka diperketat. Pemerintah Korea Selatan kemudian melarang para pencari suaka dari Yaman ini untuk meninggalkan Pulau Jeju. Hal ini dilakukan agar para pencari suaka dapat disaring sesuai dengan aturan penerimaan pengungsi untuk meredam demonstrasi. Pemerintah juga mencabut izin masuk visa bagi orang Yaman ke Pulau Jeju.

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan masuknya pencari suaka dari Yaman ini menjadi kontroversial di Korea Selatan. Yaitu pengaruh yang datang dari pemberitaan media terkait semakin memprihatinkannya krisis pengungsi di Eropa, ras, jenis kelamin, hingga agama, dan keadaan politik ekonomi Korea Selatan. Hal ini mengakibatkan para pencari suaka Yaman mengalami reaksi yang buruk dari masyarakat Korea Selatan.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam memahami lebih dalam bagaimana kedatangan pengungsi Yaman pada tahun 2018 menyebabkan fokus sekuritisasi pengungsi di Korea Selatan menjadi isu keamanan yang mengancam masyarakat. Termasuk bagaimana tanggapan masyarakat memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu terdapat perbedaan dalam artikel jurnal ini yaitu dalam fokus kajiannya yaitu kekhawatiran akan sekuriti mereka atas kedatangan pengungsi Yaman dan perubahan dalam kebijakan atas pengungsi Korea Selatan terhadap pengungsi Afghanistan.

Referensi rujukan selanjutnya dalam penelitian ini ialah tulisan yang ditulis oleh Won Geun Coi yang berjudul “*Asian Civil Society and Reconfiguration of Refugee Protection in Asia.*”<sup>28</sup> Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa kawasan Asia memiliki tingkat mekanisme perlindungan atas pengungsi yang rendah dan tidak efektif. Sekitar 9,5 juta lebih pengungsi dan pencari suaka di kawasan Asia tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini disebabkan karena negara di kawasan Asia gagal dalam membentuk aturan terhadap pengungsi dan enggan untuk menandatangani rezim pengungsi. Hanya enam negara di Asia seperti Kamboja, China, Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Timor Leste yang meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi.

Kesenjangan dalam proses pelebagaan, implementasi kebijakan, eksploitasi kebijakan dengan mengorbankan hak hak pengungsi, hingga peraturan yang kurang bertanggungjawab dalam melindungi pengungsi terjadi di negara kawasan Asia. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan dinilai hanya memanfaatkan penetapan kebijakan pengungsinya sebagai cara untuk meningkatkan reputasi nasionalnya saja. Terlihat dari rendahnya kedua negara dalam menerima dan memperlakukan pengungsi sesuai dengan norma-norma dalam HAM.

Rendahnya tingkat pengamanan dan perlindungan pengungsi di wilayah Asia, terdapat *Asia Pasific Refugee Rights Network* (APRRN) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengembangkan norma alternatif yang berpusat pada negara termasuk mobilisasi sumber daya. Kontribusi dari APRRN

---

<sup>28</sup> Won Geun Choi, “Asian Civil Society and Reconfiguration of Refugee Protection in Asia” *Human Rights Review*, (2019):1-19 <https://doi.org/10.1007/s12142-019-0548-4>.”

sebagai jaringan masyarakat sipil global menjadi proses penting dalam advokasi pemerintah dalam melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka. APRRN menggunakan pendekatan bottom-up daripada meminta pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. APRRN fokus pada upaya perlindungan hukum terhadap pengungsi dalam tingkat nasional tanpa beban ratifikasi rezim pengungsi global dan beban politik yang lebih sedikit. Sejak tahun 2008 APRRN telah menjadi mitra penting bagi negara kawasan Asia dalam mekanisme perlindungan pengungsi berdasarkan HAM.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam memahami bagaimana dinamika penerapan kebijakan pengungsi di kawasan Asia. Kehadiran APRRN dalam menaungi dan advokasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi pengungsi memberikan informasi baru bagi peneliti dalam melihat kondisi kebijakan pengungsi di Asia. Selain itu artikel jurnal ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terutama dalam fokus analisis yaitu peran APRRN dalam kebijakan pengungsi sedangkan penelitian ini melihat apa faktor yang memengaruhi Korea Selatan dalam penerimaan pengungsi.

Referensi selanjutnya yaitu tulisan Hamza Fadli dan Shen Yi berjudul *“Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim – International Protection Regime – European Union (EU) in Germany.”*<sup>29</sup> Penetapan *Regional Protection Program (RPP)* oleh Uni Eropa (UE) sebagai rezim perlindungan dalam penerimaan pengungsi membuat kawasan UE menjadi tujuan utama bagi

---

<sup>29</sup> Hamza Fadil and Shen Yi, “Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim - International Protection Regime - European Union (EU) in Germany,” *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4 (2019) : 164-180.

pengungsi Suriah akibat perang saudara tahun 2011. Dalam ketentuannya, RPP mengatur pembagian kuota dalam penerimaan pengungsi namun dalam proses pemenuhan kuota diserahkan secara sukarela dan otonomi kepada negara anggota UE. Salah satu negara yang membuka pintunya bagi pengungsi adalah Jerman pada masa kepemimpinan Angela Merkel. Lebih dari 800 ribu pengungsi Suriah telah ditampung Jerman hingga tahun 2015. Namun tidak semua negara yang membuka pintunya lebar-lebar bahkan membatasi masuknya arus pengungsi Suriah.

Namun pada tahun 2015, Jerman mengurangi kuota penerimaan akibat tekanan dari partai, dan termasuk tekanan dari masyarakat yang mulai protes. Bahkan penutupan jalur Balkan menjadi bentuk penolakan negara UE dalam membendung arus pengungsi pada tahun 2015. Kekhawatiran akan krisis ekonomi, dan merebaknya islamophobia di Eropa menjadi alasan tersendiri dalam melihat ledakan pengungsi Suriah. Hal ini juga memperlihatkan kurangnya koordinasi dan sinergi dalam membentuk strategi implementasi RPP ini.

Rezim RPP ini dinilai efektif dalam membendung masalah krisis pengungsi Suriah di Jerman tahun 2015. Meskipun pemerintah Jerman akhirnya melakukan pengurangan kuota pengungsi namun tingkat penerimaan masih tinggi dibandingkan dengan negara UE lainnya. Hal ini dinilai efektif meskipun sulit dalam prosesnya. Begitu juga bagi UE, rezim RPP juga dapat dianggap efektif meskipun perselisihan dan perubahan kepatuhan akan rezim menurun mengingat bertambahnya jumlah pengungsi.

Artikel jurnal ini memiliki kontribusi yang besar dalam penelitian ini, terutama dalam melihat masalah pengungsi dan penanganannya di Jerman. Penerimaan pengungsi Suriah oleh Jerman dengan pintu yang terbuka memberikan informasi tambahan dalam melakukan perbandingan dalam analisis. Selain itu artikel jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana dalam artikel jurnal membahas efektifitas rezim RPP sedangkan penelitian ini membahas apa faktor yang memengaruhi penerimaan Korea Selatan atas pengungsi.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan analisis atas penelitian yang berjudul “Perubahan Kebijakan Korea Selatan dalam Menangani Pengungsi Melalui Penerimaan Pengungsi Afghanistan Tahun 2021” maka peneliti menggunakan kerangka konseptual *foreign policy change*.

#### **1.7.1 Foreign Policy Change**

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam merespon tantangan yang hadir dan juga dalam mencapai suatu kepentingan nasional. Menurut Marijke Breuning, kebijakan luar negeri ialah totalitas kebijakan suatu negara dalam interaksi dengan lingkungan yang berada di luar perbatasannya.<sup>30</sup> Globalisasi menyebabkan kaburnya batasan negara sehingga hubungan antar negara semakin intens dan kebijakan luar negeri semakin beragam.<sup>31</sup> Gagasan rasionalitas menjadi landasan utama bagi para

---

<sup>30</sup> Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, 5, 2007.

<sup>31</sup> Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations.” *Journal of Political Sciences Public Affairs* 06, no. 04 (2018): 1, doi:10.4172/2332-0761.1000337.

pemimpin dan pengambil keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan. Rasionalitas akan menghasilkan keputusan yang baik dengan analisis atas situasi dan konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan.

Perubahan sistem dan kekuatan internasional dan arah kepentingan dalam hubungan antar negara membuat kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah.<sup>32</sup> Meskipun negara telah membentuk suatu kebijakan secara rasional, akan sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam merespon suatu permasalahan yang terjadi. Perubahan orientasi dalam sistem internasional ini menuntut negara harus segera melakukan adaptasi atas kebijakannya demi terpenuhinya suatu tujuan.<sup>33</sup>

Peneliti menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, dalam artikel jurnalnya menjelaskan berbagai parameter yang dapat digunakan dalam melakukan analisis atas perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Synthetic Approach*" mereka menjelaskan bahwa dalam dinamika perubahan kebijakan luar negeri suatu negara disebabkan oleh banyak faktor atau bersifat multikausalitas. Perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri suatu negara mengacu terhadap kepentingan suatu negara yang dapat kita lihat faktor penyebabnya dengan melihat parameter struktural domestik dan internasional. Seperti masukan dari sumber domestik dan internasional, perubahan dalam

---

<sup>32</sup> Bojang AS.

<sup>33</sup> Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: A Synthetic Approach" Annual ISA Convention New York, (2009): 2.

struktur politik dan juga pergeseran kognitif dan ide dalam kelompok pembuat kebijakan.<sup>34</sup>

Dalam melihat apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis menggunakan parameter yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri yang berbeda dalam tiga bentuk parameter, yaitu :<sup>35</sup>

1. *Domestic Struktural Parameters*

a. Politik dan kelembagaan domestik

Dalam pembentukan suatu kebijakan luar negeri, terdapat fungsi agregasi dimana terdapat beberapa unit yang memiliki keputusan bersifat otoritatif. Unit ini terdiri dari individu ataupun sekelompok individu yang mempunyai otoritas dalam pembentukan keputusan dan mampu memengaruhi dalam masalah luar negeri. Bentuk-bentuk dari unit ini berbeda tergantung dari jenis struktur politik, kelembagaan, oposisi politik, ruang lingkup keterlibatan masyarakat, sistem pemilihan, hingga gaya kepemimpinan. Terdapat tiga jenis unit keputusan agregasi ini, seperti pemimpin yang kuat (monarki, pemimpin diktator, atau adanya tokoh politik yang dominan), adanya kelompok tunggal, dan ada banyak aktor otonom seperti terdapat aktor dengan hak veto dalam kebijakan luar negeri.

Perubahan sering terjadi dalam rezim otokratis dengan kuatnya peran pemimpin dan rendahnya peran birokrasi dalam pembentukan

---

<sup>34</sup> Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis.

<sup>35</sup> Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, 4-8.

keputusan. Sedangkan di dalam rezim demokratis, perubahan kebijakan sangat mungkin terjadi dalam pemerintahan dengan partai tunggal dengan dominasi perdana menteri/pemimpin pemerintahan yang mengambil keputusan tertinggi atau terdapat kasus yang bersifat penting dan segera untuk ditindaklanjuti.

b. Kelompok advokasi

Kelompok advokasi diidentifikasi sebagai sekelompok orang yang berusaha mencari cara dan pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan politik dalam negara yang menganut rezim demokrasi melalui partai politik, elektoral atau bahkan koalisi. Kelompok advokasi hadir sebagai sekelompok orang yang tidak puas dengan pemerintahan dan menentang suatu aturan yang menurutnya tidak sesuai dengan seharusnya. Terdapat tiga jenis kelompok advokasi yaitu budaya politik alternatif, kelompok sosial ekonomi, opini publik, dan *policy entrepreneur* yang terdiri atas tokoh politik dengan keterampilan khusus yang mampu mengatasi lambannya pemerintah dalam mengambil tindakan dalam kebijakan luar negeri. Besarnya pengaruh dari pergerakan dari kelompok advokasi ditentukan dari seberapa kuat anggota kelompok untuk hadir dalam arena politik dan seberapa besar suara mereka dalam memengaruhi kebijakan.

2. *International Structural Parameters*

Dalam parameter ini dapat dilihat bahwa apa yang memengaruhi negara dalam menetapkan suatu kebijakan dapat berasal dari partisipasi negara tersebut dalam sistem internasional. Mulai dari interaksi dengan negara lain

dalam suatu sistem hingga perubahan dan perkembangan struktural dari sistem tersebut. Perubahan dalam sistem internasional baik perubahan dalam pemain utama, atau bahkan permasalahan yang muncul akan menghadirkan situasi ancaman, peluang atau bahkan tantangan. Dalam situasi seperti ini mengharuskan suatu negara untuk mengkonseptualisasikan ulang kebijakan luar negeri seiring dengan dinamisnya sistem internasional.

Selain partisipasi negara dalam sistem internasional, posisi dan peran negara dalam sistem internasional juga dapat merubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat tiga mekanisme yang mendorong negara menetapkan kebijakan baru bersarkan peran dan posisi dalam sistem internasional ini :

1. Interaksi negara baik dengan teman atau pun musuh dapat memicu perubahan dalam kebijakan luar negerinya. Munculnya pergolakan atau bahkan permasalahan oleh negara lain dalam sistem internasional dapat memicu suatu negara mengubah kebijakannya.

Tanggapan yang berbeda dari suatu negara dalam merespon suatu permasalahan dalam sistem internasional juga dapat memicu perubahan kebijakan.

2. Keterlibatan suatu negara dalam Organisasi Internasional (OI) juga dapat memicu adanya perubahan dan pembentukan kebijakan luar negeri yang tidak biasa. Keterlibatan negara dengan sesama anggota OI menjadi potensi penguatan relasi baik itu melalui dukungan ekonomi dan politik atau bahkan berbentuk sanksi atau

kecaman yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan suatu negara. Hubungan suatu negara dengan negara mitra juga mengakibatkan ketergantungan kebijakan dalam hubungan mereka.

3. Partisipasi negara dalam OI. OI memiliki nilai dan norma kebiasaan yang harus dipatuhi sebagai konsekuensi keanggotaan. Melalui proses sosialisasi secara bertahap atas penanaman nilai dan norma yang dapat mengalihkan suatu kebijakan.

### 3. *Domestic-International Conjunctural Parameters*

Parameter ketiga dalam analisis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat melalui peristiwa dan kondisi yang tidak terduga sehingga berimbas terhadap status quo suatu negara. Timbulnya suatu kondisi krisis menjadi salah satu celah dalam reformasi kebijakan negara. Jika peristiwa terjadi dalam parameter domestic suatu negara, seperti pergantian kepemimpinan dikarenakan sakit, kematian, atau pun reformasi, pergolakan politik seperti timbulnya guncangan politik, kudeta militer, teroris.<sup>36</sup> Sedangkan jika peristiwa terjadi dalam parameter sistem internasional seperti terjadinya bencana kemanusiaan, krisis keamanan global yang membangkitkan simpati publik, dan upaya memperbaiki citra negara dalam merespon permasalahan yang muncul dapat merubah kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>37</sup> Munculnya permasalahan baik itu krisis kemanusiaan ataupun krisis keamanan ini nantinya juga akan

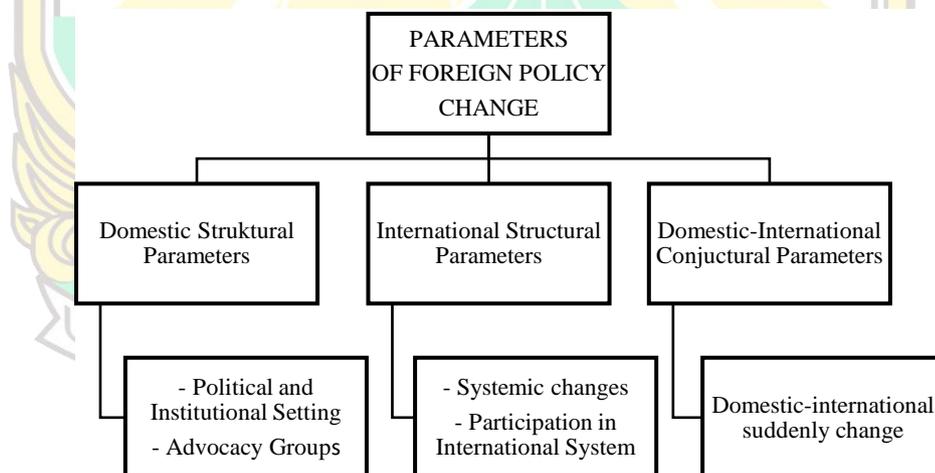
---

<sup>36</sup> Blavoukos and Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach." Hal 7-8.

<sup>37</sup> Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach." Annual ISA Convention New York," 7.

menimbulkan krisis atas kebijakan suatu negara. Sehingga dapat dilihat bahwasanya krisis kemanusiaan ataupun krisis keamanan yang terjadi memanglah berimbas atas kebijakan suatu negara sehingga terjadilah perubahan kebijakan yang kontras atas kebijakan sebelumnya.

Munculnya krisis juga menjadi salah satu parameter dalam melihat ketidaksesuaian kebijakan sebelumnya dalam menghadapi perkembangan global dan harus melakukan penataan ulang kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya krisis yang terjadi baik dalam domestik atau pun internasional dapat menunjukkan tidak kompeten nya suatu kebijakan atau gagal nya suatu kebijakan yang menghasilkan perubahan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Berikut bagan yang berisikan parameter yang memengaruhi dalam melakukan analisis atas perubahan kebijakan luar negeri menurut Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis.



**Gambar 2.1** Bagan Parameter Perubahan Kebijakan Luar Negeri  
 Sumber: Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Syntethic, Approach Annual ISA Convention New York,"<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Blavoukos and Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach."

Menggunakan teori oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis dengan tiga jenis parameter pemicu, peneliti menilai pendekatan ini mampu untuk membantu dalam analisis faktor apa yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021. Menggunakan parameter-parameter yang tersedia yaitu parameter domestik seperti politik kelembagaan dan kelompok advokasi yang dapat memengaruhi para pembuat kebijakan sehingga terjadi perubahan kebijakan. Korea Selatan merupakan negara yang sudah mengalami modernisasi ekonomi dan perkembangan demokrasi pada tahun 1980an yang signifikan sehingga pembentukan kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Seperti birokrasi, kepentingan sektor swasta, suara dari aktivis, LSM, hingga opini publik atas permasalahan tersebut.

Selain itu, program *segyehwa* atau globalisasi yang telah di canangkan oleh Presiden Kim Young Sam pada tahun 1994 menjadi titik awal bagi Korea Selatan dalam menjalin berbagai kemitraan dengan negara lain termasuk dalam meraih posisi dalam struktur internasional. Menggunakan parameter struktural internasional, peneliti menilai parameter ini mampu memperlihatkan perubahan kebijakan suatu negara berdasarkan hubungannya dengan negara lain dan struktur internasional yang sedang berjalan. Parameter terakhir akan melihat bagaimana perubahan yang tidak terduga baik itu berasal dari parameter domestik ataupun struktur internasional yang dapat terjadi sehingga memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Parameter *domestic-international conjunctural* ini baik

itu terjadinya bencana atau krisis kemanusiaan, krisis keamanan yang benar-benar berimbas atau berhubungan langsung dengan negara yang mengalami perubahan kebijakan.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dinilai mampu untuk menganalisis berbagai data guna menjawab pertanyaan dari penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan salah satu cara penelitian dengan tujuan untuk menganalisis, menggambarkan, menemukan, dan menyelidiki berbagai perilaku, seseorang, peristiwa gerakan sosial, perubahan suatu kebijakan, atau pun hubungan timbal balik.<sup>39</sup> Menurut Straus dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantitatif.<sup>40</sup>

Sedangkan untuk jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berbagai data, informasi dan gejala yang relevan sehingga dapat diketahui hubungan antara data, informasi, dan gejala dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>41</sup> Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis guna menggambarkan dan melihat apa faktor yang memengaruhi, dan kondisi apa yang ada dalam suatu situasi sehingga terjadi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021. Dengan mengaitkan beberapa

---

<sup>39</sup> Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Citapusaka Media, 2012), 41.

<sup>40</sup> Salim dan Syahrums.

<sup>41</sup> Sulipan, Penelitian Deskriptif Analitis. 2021.

jenis faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya perubahan perilaku dan kebijakan Korea Selatan dalam penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan batasan penelitian supaya hasil dan proses dalam penelitian dapat bersifat spesifik, terarah dan dapat dianalisis dengan lebih baik. Oleh karena itu peneliti memberi batasan penelitian ini dari tahun 2017 hingga 2023. Tahun 2017 merupakan tahun awal masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-In dikarenakan perubahan kebijakan atas pengungsi ini terjadi pada masa Presiden Moon Jae-In. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data dan informasi dari masa kepemimpinan Presiden Korea Selatan sebelumnya seperti pada masa Park Geun-Hye dan Lee Myung-Bak. Sedangkan tahun 2023 menjadi batasan akhir guna mendapatkan data dan informasi yang terbaru dan terkini dari dinamika penerimaan pencari suaka di Korea Selatan.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek utama yang setiap tindakan atau pun perilaku yang akan dianalisis dan dideskripsikan dalam penelitian ini, selain itu ada unit eksplanasi, merupakan unit yang memengaruhi perilaku dan tindakan dari unit analisis.<sup>42</sup> Sedangkan level analisis menurut Waltz ialah faktor-faktor penjelas merupakan tingkatan atau cakupan area yang digunakan peneliti untuk mempermudah menganalisis perilaku negara.<sup>43</sup> Terdapat tiga level dalam level analisis ini, yaitu sistem internasional, negara, dan individu. Dalam penelitian

---

<sup>42</sup> Mochtar Mos' oed. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. (Jakarta : LP3ES, 1990) : 39.

<sup>43</sup> Yessi Olivia. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional." *Transnasional* 5.01 (2013): 898.

ini, unit analisisnya adalah perubahan kebijakan Korea Selatan dalam penanganan pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Adapun unit eksplanasinya ialah faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021. Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat sistem internasional karena penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan faktor apa yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam penanganan pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021 melalui tiga parameter yaitu domestik, internasional, dan konjungtural domestik dan internasional.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* atau biasa disebut sebagai studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi mendukung yang bukan berasal dari sumber pertama atau yang disebut sebagai data sekunder.<sup>44</sup> Data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, portal berita yang kredibel, dokumen resmi pemerintah, penelitian terdahulu, data yang berasal dari portal resmi pemerintahan terkait, hingga berbagai informasi dan berita yang didapatkan berasal dari media yang kredibel dan terpercaya keabsahannya dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

Data-data dan informasi dapat diperoleh peneliti melalui situs resmi UNHCR, dan Kementerian Kehakiman Korea Selatan guna mendapatkan data terkini terkait pengungsi dan pencari suaka Korea Selatan melalui link

---

<sup>44</sup> Fenti Hikmawati. “Metodologi Penelitian” (Depok : Rajawali Pers, 2020), 19.

www.unhcr.org dan www.moj.go.kr/moj hingga situs Kementerian Luar Negeri Korea Selatan www.mofa.go.kr. Selain itu data dan informasi juga didapatkan melalui artikel jurnal dari berbagai sumber yang relevan seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Eunyoung Christina Choi dan Seo Yeon Park dengan judul “*Threatened or Threatening?: Securitization of the Yemeni Asylum Seekers in South Korea*” tahun 2020, dan artikel jurnal yang di tulis oleh Timothy S Rich, Kaitlyn Bison, and Aleksandra Kozovic. “*Who Is Welcome? South Korean Public Opinion on North Koreans and Other Refugees*” tahun 2021. Data dan informasi tambahan lainnya didapatkan oleh peneliti melalui portal berita dan media seperti *Korean Times*, *Yonhap New Agency*, *The Diplomat*, *Arab News*, *CNN Indonesia*, *New York Time*, hingga *KBS World*.

Data dan informasi yang akan dikumpulkan dan dianalisis nanti merupakan data data yang berhubungan dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam menjawab apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Dalam menjawab dan melakukan analisis atas pertanyaan penelitian di sini peneliti akan menggunakan tiga tahapan dalam melakukan analisis data : <sup>45</sup>

#### **1. Pengumpulan data/ persiapan**

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan dan pencarian data yang sesuai dengan masalah yang diangkat, data dapat berupa kumpulan informasi yang berasal dari artikel jurnal, buku, informasi dari berita, koran, dan berbagai

---

<sup>45</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok : Rajawali Pers, 2020), 89-91.

informasi yang berasal dari media sosial yang kredibel dan dapat membantu penarikan kesimpulan.

## 2. Reduksi dan Interpretasi Data

Dari banyaknya data yang sudah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan pengelompokan, pemilahan, dan penyederhanaan data dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data-data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis, hingga mengelompokkan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang sudah ditentukan sebelumnya atas masalah yang terjadi.

## 3. Pengambilan Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul mulai dari data yang penting hingga yang data tambahan lainnya, barulah data dan informasi yang sudah ditemukan dianalisis berdasarkan teori dan pendekatan yang diterapkan kemudian mengambil kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab masalah dan pertanyaan penelitian.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini secara umum berisikan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam bab ini akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II ISU PENGUNGSI DAN KEBIJAKAN PENGUNGSI KOREA SELATAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara deskriptif bagaimana isu pengungsi di Korea Selatan dan kebijakan Korea Selatan dalam menangani masalah pengungsi. Mulai dari bagaimana Korea Selatan menangani pengungsi pasca mengimplementasikan *The 1951 Refugee Convention* dan Protokol 1967 ke dalam UU domestiknya yaitu pada tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan priode kepemimpinan Presiden Korea Selatan saat itu.

### **BAB III FAKTOR *DOMESTIC STRUCTURAL PARAMETERS* YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PENGUNGI AFGHANISTAN TAHUN 2021**

Selanjutnya bab ini merupakan bagian utama dari penelitian ini yang akan menjelaskan hasil analisis dengan menggunakan konsep dan teori mengenai faktor struktur domestik yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan atas pengungsi yang berasal dari Afghanistan tahun 2021.

### **BAB IV FAKTOR *INTERNATIONAL STRUCTURAL PARAMETERS* YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PENGUNGI AFGHANISTAN TAHUN 2021**

Bab ini merupakan inti dari penelitian dan lanjutan dari bab sebelumnya dimana berisikan analisis dengan menggunakan konsep dan teori mengenai faktor struktur internasional yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan atas pengungsi yang berasal dari Afghanistan tahun 2021.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian terakhir dari penelitian ini ialah bab 5 yang berisikan kesimpulan atas penelitian dan analisis yang telah dilakukan dan termasuk juga saran atas penelitian berikutnya.